

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian sangat erat hubungannya dengan dunia usaha. Berbicara tentang dunia usaha, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin diperhitungkan dalam perekonomian Indonesia (Syamsuddin & Nuzil, 2023). Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2024), perkembangan sektor usaha saat ini berkembang cukup pesat di setiap negara berkembang. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat besar untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha (Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 2024). Menurut Himawan (2025), persaingan usaha yang dihadapi para pelaku UMKM sangatlah tinggi karena kondisi ekonomi yang sulit diprediksi akibat krisis keuangan, inflasi, hingga perubahan kebijakan pemerintah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan harga bahan baku dan permintaan pasar yang tidak stabil, UMKM tetap menjadi sektor yang berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Hidayah *et al.*, 2025).

Menurut Suardana & Musmini (2020), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan penting dalam mempercepat perkembangan perekonomian dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi untuk perekonomian suatu negara. Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin (2024), tahun 2023 pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan

Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau setara dengan Rp9.580 triliun (Kadin, 2024). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sebagian besar UMKM di Indonesia adalah usaha rumah tangga yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi UMKM dalam mendorong perekonomian nasional (Kadin, 2024). Berikut disajikan data UMKM 2018-2023 menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2024).

Tabel 1.1
Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)		1.98%	-2.24%	2.28%	-0.70%	1.52%

Sumber: Kamar Dagang dan Industri Indonesia (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia relatif stabil. Jumlah UMKM meningkat dari 64,19 juta pada tahun 2018 menjadi 66 juta pada tahun 2023, meskipun sempat mengalami penurunan di beberapa tahun tertentu. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM tetap tumbuh dan mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu pendorong utama perekonomian nasional.

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini juga tercermin di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat perekonomian di Sumatera Barat. Kota Bukittinggi sendiri memiliki potensi UMKM yang besar, terutama di sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa. Menurut Dinas Koperasi, UKM , dan Perdagangan Kota Bukittinggi (2024), terdapat 7.473 unit

UMKM yang tersebar di 3 kecamatan di Bukittinggi yaitu Guguk Panjang (GP), Mandiangan Koto Selayan (MKS), dan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB). Berikut disajikan data UMKM yang ada di Kota Bukittinggi :

Tabel 1.2

Jumlah UMKM Kota Bukittinggi tahun 2023

Kecamatan	Mikro	Menengah	Kecil	Jumlah
Guguk Panjang	2.406	0	28	2.434
Mandiangan Koto Selayan	3.512	0	9	3.521
Aur Birugo Tigo Baleh	1.505	0	13	1.518
Jumlah	7.423	0	50	7.473

Sumber : Arsip Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi (2024)

Berdasarkan tabel diatas, usaha mikro mendominasi dengan 7.423 unit, kategori usaha kecil sebanyak 50 unit, serta tidak adanya usaha menengah yang terdaftar di Bukittinggi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut tentunya dihadapkan berbagai kendala, termasuk rendahnya tingkat literasi keuangan dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pelaku UMKM tidak mampu memahami prosedur dan persyaratan untuk mengakses layanan keuangan formal. (Fitria *et al.*, 2021). Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan rendah cenderung tidak memahami manfaat, fungsi, serta cara kerja produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit usaha, atau asuransi. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM tidak memanfaatkan layanan keuangan formal secara optimal karena keterbatasan pemahaman terhadap manfaat dan prosedurnya.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), literasi keuangan merupakan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan seseorang dalam memahami konsep dasar

keuangan, kemampuan mengelola keuangan, kebiasaan seseorang dalam menggunakan produk layanan keuangan serta kemampuan menerapkan pemahaman keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamalapatrissa & Lestari (2023), literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep dasar keuangan, mengelola keuangan pribadinya, serta mengambil keputusan keuangan yang tepat.

Menurut Joseph (2024), literasi keuangan berkaitan dengan pemahaman seseorang dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat. Menurut Utomo *et al.* (2020), literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan keuangan pemilik atau pengelola UMKM dalam mengambil keputusan pendanaan yang tepat, yang pada akhirnya akan memengaruhi kinerja perusahaan pada berbagai tahap pengembangannya, termasuk pemilihan produk dan layanan keuangan yang sesuai. Menurut Gauzi *et al.* (2023), literasi keuangan bagi pelaku UMKM merupakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi keuangan serta kemampuan memanfaatkan berbagai layanan keuangan.

Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan literasi keuangan yang baik, mampu mengelola arus kas, menyusun anggaran, dan memanfaatkan berbagai produk keuangan untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka (Abdallah *et al.*, 2024). Berikut disajikan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis OJK setiap 3 tahun sekali dari tahun 2013-2024 mengenai tingkat literasi keuangan di Indonesia.

Tabel 1.3
Indeks Literasi Keuangan Nasional 2013-2024

Tahun	Indeks Literasi Keuangan
2013	21,84%
2016	29,70%
2019	38,03%
2022	49,68%
2024	65,43%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) diatas, menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan selama periode 2013-2024. Tahun 2013, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 21,84%, menjadi 65,43% pada tahun 2024 sebesar. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan, termasuk pengelolaan uang, pemanfaatan produk keuangan serta pengambilan keputusan finansial yang baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Bertolak belakang dengan hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti yang ditujukan kepada 35 responden yaitu pelaku UMKM di Kota Bukittinggi. Sebanyak 68,6% responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman dasar tentang laporan keuangan seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha atau laporan laba rugi sederhana. Hasil survei ini dikuatkan dengan salah satu item pertanyaan terkait seberapa sering pelaku UMKM mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4
Hasil Pra Survei Penelitian

Pertanyaan	Selalu	Kadang-kadang	Tidak Pernah
Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara/i mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha?	25,7%	51,4%	22,9%

Sumber : Pra Survei (2025)

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum memiliki kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara konsisten . Terdapat 25,7% responden yang selalu mencatat keuangan usahanya, sementara 51,4% responden kadang-kadang mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha, dan 22,9% tidak pernah mencatat sama sekali. Temuan ini menguatkan data sebelumnya bahwa 68,6% responden tidak memiliki pemahaman dasar tentang laporan keuangan, yang mencakup pencatatan keuangan sederhana seperti pemasukan dan pengeluaran usaha.

Literasi keuangan memiliki banyak aspek dan berperan penting bagi pemilik usaha dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat, memilih sumber pembiayaan yang sesuai, dan meningkatkan kinerja perusahaan di berbagai tahap perkembangan (Rosliyati & Iskandar, 2022). Menurut Abdallah *et al.* (2024), kinerja UMKM merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi, karena mereka secara signifikan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2023), mengungkapkan bahwa literasi keuangan akan mempengaruhi kinerja keuangan UMKM yang konsisten dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa tingkat literasi keuangan yang lebih

tinggi, akan meningkatkan kemampuan menjalankan usaha tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Prakoso (2020) juga mengungkapkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria *et al.* (2021), literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Dalam beberapa tahun terakhir, literasi keuangan dan akses pembiayaan UMKM menjadi semakin terkait erat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membutuhkan literasi keuangan untuk mengelola keuangan mereka dengan baik, menghindari utang berlebih, dan mencegah kebangkrutan (Fitria *et al.*, 2021). Kurangnya literasi keuangan menjadi hambatan bagi UMKM dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi UMKM sehingga menghalangi akses ke modal eksternal (Fitria *et.al.*, 2021). Menurut Fatoki (2021), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membutuhkan literasi keuangan guna mengelola uang dan pendapatannya dengan efektif. Peningkatan literasi keuangan diperlukan agar UMKM dapat menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pemberi pinjaman dan memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan (Fatoki, 2021). Untuk itu, meningkatkan literasi keuangan menjadi langkah penting agar UMKM dapat berkembang lebih baik dan mengakses pembiayaan secara optimal (Fatoki, 2021).

Sumber daya keuangan merupakan elemen vital dalam operasional dan pengembangan bisnis, termasuk pada sektor UMKM. Menurut Putra *et al.*, (2021), sumber daya keuangan adalah aset organisasi yang digunakan untuk mengimbangi

kewajiban sekaligus memperoleh aset lainnya. Menurut Khoddami *et al.* (2024), sumber daya keuangan adalah segala bentuk aset keuangan yang dapat digunakan oleh suatu bisnis atau individu untuk mendukung operasional, investasi, dan pertumbuhan usaha. Menurut Ferli (2023), ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis kecil. Keberlangsungan dan keberhasilan UMKM sangat bergantung pada memadainya keuangan usaha tersebut. Namun, kurangnya sumber daya keuangan sering menjadi kendala utama yang menghambat ekspansi bisnis (Ferli, 2023). Meskipun sumber daya keuangan tersedia, tantangan lain yang sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan yang dapat membantu mereka mengelola dan mengembangkan bisnis secara optimal (Cahyaningtyas & Karim, 2024).

Putra *et al.*, (2021), mencatat bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sering menghadapi tantangan dalam memperoleh akses keuangan, terutama karena adanya ketidaksesuaian informasi antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan eksternal, seperti lembaga keuangan. Ketidakjelasan informasi, seperti laporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik, menjadi alasan UMKM sulit mendapatkan kepercayaan dari penyedia layanan keuangan. Akibatnya, banyak UMKM mengalami hambatan dalam mengakses modal yang diperlukan untuk mendukung prospek pertumbuhan mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan bisnis secara dini (Putra *et al.*, 2021).

Menurut Kartikasari *et al.* (2024), tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mengakses keuangan termasuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank adalah ketidakmampuan mereka dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar perbankan. Banyak UMKM masih menggunakan pencatatan keuangan sederhana atau bahkan tidak memiliki laporan keuangan sama sekali, sehingga sulit bagi lembaga keuangan untuk menilai kondisi keuangan usaha tersebut (Kartikasari *et al.*, 2024). Menurut Mubiroh & Ruscitasari (2024), meskipun UMKM tidak selalu diwajibkan menyusun laporan keuangan yang kompleks seperti perusahaan besar, bank tetap mengharuskan laporan yang sistematis dan konsisten. Beberapa bank sudah mulai menerima laporan keuangan sederhana berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) seperti laporan neraca, laporan laba rugi serta catatan atas laporan keuangan yang lebih mudah diterapkan oleh pelaku UMKM (Mubiroh & Ruscitasari, 2024).

Akses keuangan memainkan peran penting dalam memperkuat dampak literasi keuangan terhadap kinerja UMKM (Changweshia & Mutezo, 2023). Pemerintah Indonesia terus mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai program, termasuk pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Gilang (2024), Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah salah satu program pemerintah untuk membantu UMKM memperoleh kredit atau modal usaha kepada individu, badan usaha ataupun kelompok usaha yang produktif melalui lembaga perbankan formal dengan bunga rendah. Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu bentuk akses

layanan keuangan formal bagi UMKM yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan serta mendukung keberlanjutan usaha mereka (Marselina *et. al.*, 2024).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), total penyaluran KUR pada tahun 2020 mencapai Rp178,07 triliun, meningkat sebesar 16,25% dari tahun sebelumnya, dan Rp192,59 triliun pada tahun 2021. Sementara itu, menurut Kementerian Keuangan (2024), total penyaluran KUR pada tahun 2022 sebesar Rp365,50 triliun serta pada tahun 2023 turun menjadi Rp255,8 triliun. Dukungan ini menunjukkan pentingnya akses terhadap modal dalam meningkatkan kinerja UMKM. (Abdallah *et al.*, 2024).

Tahun 2023 lebih dari 70% UMKM di Indonesia belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, seperti pinjaman bank, layanan asuransi, akses ke pasar modal, serta layanan dompet digital (OJK, 2023). Keterbatasan ini diperparah dengan rendahnya literasi keuangan pemilik UMKM, yang menghambat kemampuan mereka dalam mengelola modal kerja, menyusun laporan keuangan, serta mengakses pendanaan eksternal (Fatoki, 2021). Banyak pelaku UMKM yang belum mampu membuat laporan keuangan sederhana, sehingga kesulitan memenuhi persyaratan lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit (Fatoki, 2021).

Kota Bukittinggi memperoleh penghargaan dari OJK Sumatera Barat sebagai daerah dengan akses keuangan terbaik pada tahun 2023 (OJK, 2023). Bertolak belakang dengan hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti yang ditujukan kepada 35 responden yaitu pelaku UMKM di Kota Bukittinggi, sebesar 65,4% para pelaku usaha pernah mengajukan kredit usaha namun tidak disetujui. Alasan ditolaknya

pengajuan pinjaman atau kredit pun beragam, mulai dari tidak memiliki jaminan, tidak memiliki laporan keuangan, serta proses administrasi yang sulit. Berdasarkan pengalaman mengakses layanan keuangan, dari 35 responden pelaku UMKM di Kota Bukittinggi, terdapat jawaban seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.5
Hasil Pra Survei Penelitian

Pertanyaan	Sulit	Cukup Sulit	Mudah	Cukup Mudah
Bagaimana pengalaman bapak/ibu/saudara/I dalam mengakses layanan keuangan di Bukittinggi? (Pinjaman Kredit Usaha Rakyat/KUR, pinjaman koperasi, layanan asuransi, dan lainnya)	28,6%	34,3%	14,3%	22,9%

Sumber : Pra survei (2025)

Berdasarkan data pada tabel 1.5 diatas, menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Kota Bukittinggi masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan untuk menjalankan usaha mereka. Menurut Abdallah *et al.* (2024), akses keuangan memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan kinerja UMKM. Akses keuangan yang baik akan memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UKM. Sementara itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Herrera *et al.* (2023), akses keuangan tidak memperlemah ataupun memperkuat hubungan antara literasi keuangan dengan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah.

Belum banyak penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara literasi keuangan, akses keuangan, dan kinerja UMKM di Kota Bukittinggi. Melihat kesenjangan ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah akses keuangan memoderasi antara literasi keuangan dengan kinerja UMKM di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi

penelitian selanjutnya, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pihak terkait seperti pelaku UMKM Kota Bukittinggi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna mengetahui fakta dilapangan dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Akses Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Bukittinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Bukittinggi?
2. Apakah pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM yang dimoderasi oleh akses keuangan di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Bukittinggi.
2. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM yang dimoderasi oleh akses keuangan di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak diantaranya :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan gagasan bagi perkembangan keilmuan bagi pihak terkait diantaranya :

- a. Bagi para pelaku UMKM, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kinerja UMKM yang ada di Kota Bukittinggi serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan literasi keuangan serta akses keuangan bagi pelaku UMKM di Kota Bukittinggi. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, serta memberikan kontribusi tentang keterkaitan antara “Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Akses Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Bukittinggi”.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bukittinggi. Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja UMKM tersebut. Penelitian ini mengukur variabel literasi keuangan dari aspek pemahaman dasar terhadap literasi pembukuan keuangan, literasi menabung, literasi utang, literasi investasi serta literasi asuransi. Selain itu, penelitian ini menggunakan akses keuangan sebagai variabel moderasi yang diharapkan dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara literasi keuangan dan kinerja UMKM.

Responden dalam penelitian ini ditujukan kepada pemilik atau pengelola UMKM yang berada di Kota Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner yang diisi oleh pelaku UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur di bidang manajemen keuangan UMKM serta menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan literasi dan akses keuangan bagi pelaku UMKM di Kota Bukittinggi.

1.6 Sistematika Penulisan

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengkaji tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian, ruang lingkup dari penelitian serta sistematika dalam penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN LITERATUR

Dalam bab ini mengkaji tentang teori yang melandasi penelitian ini terkait variabel literasi keuangan, kinerja UMKM serta akses keuangan. Selain itu, bab ini juga membahas teori acuan dasar, penelitian terdahulu yang menunjang penelitian, keterkaitan dari variabel yang ada, pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual.

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini mengkaji tentang desain penelitian yang digunakan, operasional variabel, sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, sampel dan populasi, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel serta metode analisis data yang digunakan.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mengkaji tentang hasil dari analisis data terhadap objek yang diteliti sesuai judul yang disajikan.

5. BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini mengkaji kesimpulan dan saran bagi pihak yang terkait.